

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI KABUPATEN PIDIE

Muhammad Andi¹, Murniati AR², Nasir Usman³

¹⁾ Magister Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

^{2,3)} Prodi Magister Administrasi Pendidikan Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh 23111, Indonesia

Email: andiemila95@yahoo.com

Abstract: *The School Operational Assistance (BOS) program as one of the indicators of the completion of compulsory education program started from elementary school until senior high school/equal does not only aim to maintain the Gross Participation Rate but also to contribute important roles in improving the quality of education. The education fee is an important component in the implementation of education. The education process cannot run smoothly without financial support. The purpose of this study was to describe and analyze the matters related to the program of using the BOS funds, the strategy of using the BOS funds, and the supervision of the use of BOS funds at Private Islamic Elementary Schools of Pidie Regency. The method used in this study was descriptive method with qualitative approach. The techniques of data collection used were interview, observation, and documentation. The subjects of this study were school principals, teachers, school treasures, and school committees. The result of this study showed that: (1) The program of using BOS funds at Private Islamic Elementary Schools of Pidie Regency was designed and implemented by the school principals with involving the school treasures, the senior teachers, and the school committees. The centralistic and de-centralistic system was adopted in Islamic elementary school financial system. (2) The strategy of using BOS at Private Islamic Elementary Schools of Pidie Regency in term of financial point was that all kind of expenditures for educational activity at school should be transparent for both the school principal and other school internals that are involved in the drafting process of School Budget. (3) The supervision of the use of BOS funds at Private Islamic Elementary Schools of Pidie Regency was carried out by the school principals and the officials of Regional Office of Religious Affairs of Pidie Regency as the internal supervisor. The supervision system was carried out through observing each income and expenditure of BOS funds. The audit by implementing indirect observation process, such as the expenditure, should be approved by the school principals or school treasures. The financial auditing was also carried out through auditing the financial statement of each activities, which were submitted by teachers or school treasures.*

Keywords: *Effectiveness, School Operational Assistance Funds, and Private Islamic Elementary Schools*

Abstrak: Program BOS sebagai salah satu indikator penuntasan program wajib belajar sejak SD sampai SMA/ sederajat, bukan hanya bertujuan mempertahankan Angka Partisipasi Kasar (APK), namun juga berkontribusi penting untuk peningkatan mutu pendidikan. Biaya pendidikan adalah komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsi dan menganalisis hal-hal yang berkenaan dengan: program penggunaan dana BOS, strategi penggunaan dana BOS, dan pengawasan penggunaan dana BOS pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kabupaten Pidie. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian: kepala sekolah, guru, bendaharawan sekolah, dan komite sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Program penggunaan dana BOS pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kabupaten Pidie disusun dan dilaksanakan oleh kepala sekolah, dengan melibatkan bendaharawan, guru senior, dan komite sekolah. Pembiayaan pada madrasah ibtidaiyah menganut sistem sentralistik dan desentralistik; (2) Strategi penggunaan dana BOS pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kabupaten Pidie ditinjau dari sisi keuangan, bahwa semua jenis pengeluaran untuk kegiatan pendidikan pada sekolah harus diketahui bersama, baik kepala sekolah maupun pihak-

pihak internal sekolah yang terlibat dalam proses penyusunan RAPBS; dan (3) Pengawasan penggunaan dana BOS pada madrasah ibtidaiyah swasta di Kabupaten Pidie dilakukan oleh kepala sekolah dan pejabat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie sebagai pengawas internal. Sistem pengawasan yang dilakukan adalah dengan cara mengamati setiap pemasukan dan pengeluaran dana BOS. Pemantauan atau pemeriksaan dengan melakukan pengamatan secara tidak langsung misalnya setiap pengeluaran dana harus atas persetujuan kepala sekolah atau bendaharawan. Pemeriksaan keuangan juga dilakukan dengan cara memeriksa laporan keuangan pada setiap kegiatan yang dilakukan, yang diserahkan oleh guru atau bendaharawan.

Kata kunci: Efektivitas, Dana BOS, dan MIS

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah meningkatkan derajat pendidikan dengan berbagai hal, termasuk peningkatan anggaran pendidikan 20 persen sebagai amanat Undang-undang Dasar, secara eksplisit pelaksanaan pendidikan tidak lagi hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, tetapi juga sudah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Pelaksanaan pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, baik dalam konteks pengelolaan maupun dalam pengawasan pendidikan. BOS tidak sepenuhnya membebaskan peserta didik dari biaya sekolah. Ada komponen biaya yang tetap dibebankan pada sekolah, BOS hanya bersifat sebagai pendamping dana yang berasal dari pemerintah daerah. Implikasi yang diharapkan dari hal tersebut adalah bagaimana dana pemerintah daerah dapat mendampingi dana pemerintah pusat. Dengan kata lain, apakah berjalan atau tidak penerapan program dana BOS secara efektif tergantung pada kesiapan masing-masing pemerintah daerah. BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar yang

dicanangkan, namun demikian dana tersebut juga dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personalia dan biaya investasi.

Merujuk pada Panduan Teknis Bantuan Operasional Sekolah (2012:3), dinyatakan sebagai berikut:

Bahwa salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD dan SMP. Pada tahun 2011, APK SD/MI dan SMP/MTs telah mencapai 102.58% dan 89,57. Kontribusi MI dan MTs atas APK nasional tersebut sebesar 12.44% dan 19.86%. Dengan APK sebesar ini, maka dapat dikatakan bahwa program Wajib Belajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Sejak tahun 2009, pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan, dan orientasi, sehingga program BOS bukan hanya berperan untuk mempertahankan APK, tetapi juga berkontribusi besar untuk peningkatan mutu pendidikan dasar. Seiring dengan kenaikan biaya satuan BOS yang signifikan, program ini akan menjadi pilar untuk mewujudkan pendidikan yang terjangkau bagi semua kalangan masyarakat pada tingkat pendidikan dasar.

Berdasarkan Juknis Pelaksanaan BOS pada Madrasah (2012:1) bahwa secara umum program BOS bertujuan:

Secara umum untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: (1) Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta; (2) Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI Negeri dan MTs Negeri, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI); (3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di Madrasah Swasta/PPS.

Tujuan program BOS, seperti tercantum dalam buku panduan yang diterbitkan oleh Dirjen Pendis Kementerian Agama RI, yang pada awalnya untuk meringankan beban masyarakat dalam biaya pendidikan khususnya jenjang pendidikan dasar menjadi rancu pada saat pemerintah mencanangkan program sekolah gratis. Asumsi masyarakat bergeser pada pengertian bahwa dana BOS yang telah digulirkan pemerintah sebelum sekolah gratis didengungkan, ditujukan untuk menggratiskan pembiayaan sekolah, padahal dana BOS secara resmi hanya diperuntukkan untuk meringankan beban biaya peserta didik. Secara lebih lanjut berdasarkan Juknis Pelaksanaan BOS pada Madrasah (2012:2) bahwa: "Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/MI dan SMP/MTs, termasuk PPS Ula dan Wustha. Jumlah dana BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: (1) MI/PPS Ula: Rp 570.000,-/siswa/tahun; (3) MTs/PPs 710.000,-/siswa/ tahun."

Mengacu pada latar belakang di atas, penulis meyakini bahwa dana BOS pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kabupaten Pidie belum efektif baik dari segi ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, ketepatan waktu dan ketepatan penggunaannya. Penilaian efektivitas program perlu dilakukan untuk menemukan informasi tentang sejauhmana penggunaan dana BOS di madrasah sudah dilaksanakan, apakah sudah tepat sasaran, sudah tepat jumlahnya sesuai dengan jumlah siswa yang dimiliki, sudah tepat waktu pencairannya dan sudah tepat penggunaannya sesuai dengan anjuran peruntukan dana BOS. Indikasi-indikasi tersebut mendorong perlu dilakukannya evaluasi efektivitas penggunaan dana BOS di madrasah. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: "Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kabupaten Pidie."

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Konsep Efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas sebenarnya berasal dari kata "*Effect*" yang berarti berhasil, dan kata sifatnya adalah "*Effective*" berarti berhasil, setelah menjadi kata keterangan, efektivitas pengertiannya berubah menjadi berhasil. Jika ditinjau dari segi ekonomi dan manajemen dapat disimak di antaranya pendapat Drukker, sebagaimana dikutip oleh Soewartoyo (2007:163), mendefinisikan efektivitas adalah "suatu ketetapan tindakan atau kesempurnaan (jaminan) hasil suatu pekerjaan." Dengan

demikian yang dimaksud dengan keefektifan adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan dengan usaha kerja sama.

Efektivitas didasarkan pada kapasitas suatu organisasi yang memperoleh dan memanfaatkan sumber dayanya yang langka dan berharga semaksimal mungkin dalam usaha mengejar tujuan operasionalnya. Tujuan yang ditetapkan mencakup beberapa tujuan lagi dalam suatu kerangka kerja yang dinamis, maka tujuan tidak diperlukan sebagai keadaan akhir yang statis, tetapi sebagai suatu yang dapat berubah dalam perjalanan waktu. Tercapainya tujuan jangka pendek tertentu dapat mempersembahkan masukan-masukan (faktor-faktor produksi) baru demi tujuan berikutnya.

Berdasarkan pendapat di atas jelaslah bahwa, efektivitas menggambarkan suatu pengertian terhadap suatu keadaan, di mana metode-metode yang ditemukan atau kesempurnaan hasil suatu pekerjaan yang diinginkan, seperti halnya dalam penggunaan dana BOS di sekolah, termasuk kategori efektif apabila dana tersebut tepat sasaran dan didayagunakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Konsep Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan merupakan bagian dari manajemen pembiayaan. Manajemen sebagai suatu proses atau pembentukan kerja yang melibatkan bimbingan atau petunjuk dari sekelompok orang terhadap tujuan organisasi.

Sebagai suatu proses, manajemen meletakkan fungsinya pada interaksi orang-orang, baik yang berada di dalam maupun di luar lembaga formal, atau yang berada di bawah atau di atas posisi operasional seseorang dalam organisasi.

Ditinjau dari konteks pendidikan, menurut Suharsaputra (2010:13) bahwa: “manajemen/administrasi pendidikan pada prinsipnya merupakan suatu bentuk penerapan manajemen atau administrasi dalam mengelola, mengatur, dan mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam dunia pendidikan.” Untuk menjalankan organisasi pendidikan diperlukan manajemen pembiayaan yang efektif. Sekolah idealnya dikelola dengan manajemen efektif yang mengembangkan potensi peserta didik, sehingga memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang mengakar pada karakter bangsa. Di samping itu, dengan manajemen yang efektif, maka pembiayaan pendidikan dapat dikelola dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan kutipan di atas jelas bahwa secara teoretis biaya atau *cost* dalam konsep pendidikan adalah nilai besar dana yang diperkirakan perlu disediakan pada proyek kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan pendidikan. Biaya dalam kaitan ini adalah sesuatu yang harus dikeluarkan dalam mencapai keuntungan. Konsep biaya tidak selalu identik dengan uang.

Biaya pendidikan dapat diartikan dengan segala sesuatu yang dikeluarkan dalam bentuk sumber daya, untuk mendapatkan pengambilan

berupa barang atau layanan jasa dalam rangka pencapaian tujuan di bidang pendidikan. Biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai proses pelaksanaan pendidikan pada tingkat satuan atau lembaga. Biaya merupakan unsur yang sangat penting dalam proses pendidikan, sebagaimana dinyatakan oleh Mulyono (2010:81), sebagai berikut:

Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Biaya pendidikan juga merupakan komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan-tujuan yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif; biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan.

Proses Pembiayaan Pendidikan

Harus diakui bahwa sampai sejauh ini pemerintah masih dan harus tetap merupakan sumber terbesar pembiayaan pendidikan. Sebagaimana dilaporkan oleh Bank Dunia, proporsi pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah untuk sekolah negeri, menurut Supriadi (2006:222) meliputi: “83% di SD; 81% di SLT, 78% di SMU, 79% di SMK. Sekitar 95-99% dari

dana pendidikan tersebut digunakan untuk membayar gaji guru/pegawai.” Dana pendidikan yang bersumber dari keluarga, masing-masing 3%; 12%; 17%; dan 15%. Sumber-sumber lain hanya menyumbang masing-masing sekitar 1%; 3%; 2%; dan 2%.

Besarnya proporsi biaya yang bersumber dari pemerintah bukan berarti bahwa seluruh kebutuhan dana operasional pendidikan telah tercukupi. Kecilnya biaya yang bersumber dari keluarga tidak juga berarti bahwa biaya yang dibebankan kepada keluarga dapat dengan mudah dijangkau oleh masing-masing rumah tangga. Sedangkan kecilnya proporsi biaya yang berasal dari sumber-sumber lain, mengindikasikan bahwa belum seluruh elemen masyarakat berkontribusi bagi pendidikan. Tanpa kontribusi itu, upaya peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan akan tetap menghadapi masalah, meskipun porsi APBN dan APBD 20% untuk pendidikan telah betul-betul direalisasi.

Berbicara tentang pembiayaan berarti berbicara mengenai kegiatan-kegiatan yang ditempuh dalam rangka pencarian sumber dana dan pendistribusiannya untuk keperluan penyelenggaraan proses pendidikan. Proses penyelenggaraan pendidikan pada lembaga pendidikan yang didukung oleh pendanaan yang memadai, memungkinkan terjaminnya kelancaran berbagai kegiatan pencapaian tujuan pendidikan.

Jenis-jenis Pembiayaan Pendidikan

Setiap proses pendidikan membutuhkan sejumlah biaya yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sarana dan prasarana serta kegiatan lain yang diperlukan dalam

penyelenggaraan pendidikan. Biaya pendidikan sebagai pengorbanan yang dikeluarkan untuk dapat terselenggaranya proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

1) Biaya langsung

Biaya langsung merupakan biaya atau pengorbanan yang dikeluarkan secara langsung dalam proses pendidikan yang berhubungan kegiatan peningkatan mutu pendidikan, misalnya bangunan gedung, pembelian buku, gaji pendidik, perlengkapan belajar mengajar, dan berbagai kebutuhan lain yang secara langsung digunakan dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

Anwar (2006:39) menyatakan bahwa: “biaya langsung pada hakekatnya adalah biaya yang dikeluarkan dan berpengaruh terhadap output pendidikan, yaitu berupa nilai pengorbanan untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.” Biaya ini secara langsung dirasakan manfaatnya oleh peserta didik sebagai penunjang terlaksananya kegiatan pendidikan pada lembaga bersangkutan.

2) Biaya tidak langsung

Biaya tidak langsung adalah sejumlah biaya atau pengeluaran yang tidak langsung berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Biaya ini ditimbulkan oleh adanya penyelenggaraan kegiatan pendidikan, misalnya hilang pendapatan peserta didik selama

mengikuti pendidikan, bebasnya beban pajak karena sifat lembaga pendidikan yang tidak mencari keuntungan, bebasnya sewa perangkat lembaga yang tidak dipakai secara langsung dalam proses pendidikan, penyusutan sebagai cermin pemakaian barang keperluan sekolah yang sudah lama dipergunakan atau dimanfaatkan.

3) Private Cost dan Social Cost

Private cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai pendidikan, misalnya orang tua mengeluarkan biaya pakaian, buku-buku, ongkos transpor keperluan kuliah anaknya, serta berbagai keperluan lain yang bersifat pribadi namun berhubungan dengan keperluan sekolah. Sedangkan yang dimaksud dengan *social cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, kelompok bukan pribadi, dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan.

Perencanaan dalam Pembiayaan Pendidikan

Perencanaan biaya adalah perencanaan sumber dana dan jumlah yang akan digunakan demi tercapainya tujuan pendidikan. Perencanaan dana juga disebut dengan penganggaran. Penganggaran merupakan suatu kegiatan perencanaan dan koordinasi dari berbagai kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu periode tertentu dengan melakukan perkiraan kebutuhan yang diperlukan dan hasil

yang ingin dicapai serta pengawasan pelaksanaannya.

Abubakar (2012:257) menyatakan bahwa: “Manajemen memiliki tiga tahapan penting yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penilaian (evaluasi). Ketiga tahapan ini apabila diterapkan dalam manajemen keuangan adalah menjadi tahap perencanaan keuangan (*budgeting*), tahap pelaksanaan (*akunting*), dan tahap penilaian atau *auditing*.”

Berkenaan tentang pentingnya perencanaan dalam manajemen pembiayaan, Fattah (2008:49) memberi batasan perencanaan adalah: “suatu proses intelektual yang menentukan secara sadar tindakan yang akan ditempuh dan mendasarkan keputusan-keputusan pada tujuan yang hendak dicapai, informasi yang tepat waktu dan dapat terpercaya, serta memperhatikan perkiraan keadaan yang akan datang.” Perencanaan keuangan di Indonesia dilakukan setahun sekali, yaitu sebelum tahun anggaran dimulai tanggal 1 April setiap tahunnya dan mulai tahun 2005 tahun anggaran berakhir bulan Desember serta akan dimulai 1 Januari tahun berikutnya.

Perencanaan biaya ada dua jenis yaitu biaya rutin dan biaya pembangunan. Perbedaan kedua jenis biaya ini dijelaskan oleh Pidarta (2008:129), bahwa: “perencanaan biaya rutin tidak sejelas perencanaan biaya pembangunan. Pengalokasian biaya pembangunan lebih jelas dan lebih eksplisit dibanding pengalokasian rutin, mengingat tiga alasan: pertama, kegiatan

rutin hampir sama setahunnya, tidak banyak variasi.” Biaya pembangunan banyak sekali ragamnya dan bisa berganti-ganti setiap tahun. Kedua, kegiatan rutin dimulai pada tahun pelajaran/tahun akademik, sedangkan pembangunan diawali pada awal tahun anggaran. Ketiga, struktur dan kegiatan pembangunan proyek belum semantap struktur dan prosedur kegiatan rutin.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Jenis kegiatan yang boleh dibiayai oleh BOS secara detail termaktub dalam Buku Panduan Operasional Sekolah, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010. Berdasarkan petunjuk yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (2010:2) program BOS bertujuan, sebagai berikut:

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1. Menggratiskan seluruh siswa SD dan SMP dari biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).

2. Menggratiskan seluruh siswa miskin dari pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa sekolah swasta.

Sehubungan dengan peningkatan mutu Pendidikan dasar 9 Tahun, banyak program yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga. Menurut Mulyono (2010:198) di antaranya: “Program dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta program tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.” Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik, sehingga pada akhirnya mutu pendidikan dapat tercapai dengan optimal.

HASIL PEMBAHASAN

Program Penggunaan Dana BOS

Perencanaan pembiayaan lembaga pendidikan seperti halnya MI memerlukan data yang akurat sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan datang dapat diantisipasi dalam rancangan anggaran. Untuk mengefektifkan penyusunan rencana anggaran pada tingkat sekolah, kepala sekolah adalah sebagai *top manager* yang bertanggung jawab

sebagai pelaksana. Kepala sekolah harus mampu menerjemahkan program-program pendidikan ke dalam ekuivalensi biaya dalam penyusunan RAPBM.

Perencanaan pembiayaan sekolah memerlukan data yang akurat dan lengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan datang dapat diantisipasi dalam rancangan anggaran. Upaya mengefektifkan pembuatan perencanaan keuangan sekolah, maka yang sangat bertanggung jawab sebagai pelaksana adalah kepala sekolah. Posisi kepala sekolah sebagai *top manager* harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi perbuatan administratif.

Berdasarkan perspektif tersebut perencanaan biaya pendidikan sekolah harus dapat membuka jalan bagi pengembangan dan penjelasan konsep-konsep tentang tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan, dan merancang cara-cara penyampaian. Hal ini disadari bahwa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai lembaga MI tidak sama dengan sekolah lanjutan, seperti SMA. Apalagi dana perencanaan dan penggunaan dana BOS.

Pembiayaan merupakan hal yang sangat penting, karena setiap kegiatan senantiasa terkait dengan dana. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Gojali dan Umiarso (2010:102) sebagai berikut:

Keuangan di sekolah merupakan bagian yang amat penting karena setiap kegiatan membutuhkan dana. Untuk itu, sekolah

perlu manajemen keuangan yang baik. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atau pengendalian.

Berpijak pada rumit perencanaan dan pengelolaan manajemen pembiayaan pendidikan, perlunya melibatkan tim penyusun anggaran, sehingga RAPBM yang disusun sesuai menurut aspirasi dan kebutuhan internal sekolah (MI) serta masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan.

Strategi Penggunaan Dana BOS

Proses pengeluaran dana pada sekolah ditinjau dari sisi keuangan, maka seluruh jenis pengeluaran untuk kegiatan pendidikan pada sekolah harus diketahui bersama baik oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie maupun pihak-pihak internal MIS Kabupaten Pidie yang terlibat dalam proses penyusunan RAPBM, sebagaimana telah disebutkan di atas. Mulyono (2010:164) menyatakan bahwa:

Pola pengelolaan anggaran belanja sekolah, terbatas pada pengelolaan tingkat operasional. Salah satu kebijakan tingkat sekolah adalah adanya pencarian tambahan dan dari partisipasi masyarakat. Selanjutnya, cara pengelolaannya dipadukan sesuai dengan tatanan yang lazim sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, sesuai dengan semangat MBS, sekolah memiliki kewenangan dan keleluasaan yang sangat lebar dalam kaitannya dengan pengelolaan

dana untuk mencapai efektivitas pencapaian tujuan sekolah.

Anggaran di samping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah. Menurut Fattah (2006:49) bahwa: "anggaran juga dapat berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan."

Pengawasan Penggunaan Dana BOS

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan di lingkungannya. Sagala (2012:59) menyatakan bahwa: "Pengawasan ialah fungsi administratif yang mana setiap administrator memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki." Pengawasan pada dasarnya tidak hanya terkait dengan pelaporan, melainkan pengajuan tindakan untuk mengendalikan ke arah tujuan yang akan dicapai.

Pemeriksaan anggaran pada dasarnya merupakan aktivitas menilai, baik catatan maupun menentukan prosedur-prosedur dalam mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan, kebijakan dan standar-standar yang berlaku. Terutama dalam penggunaan dana BOS, pengawasan sangat penting dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaannya.

Upaya menghindari penyimpangan penggunaan adalah dengan menerapkan manajemen pembiayaan yang efektif dan efisien. Kontribusi pendanaan/pembiayaan yang cukup signifikan pengaruhnya bagi kualitas pendidikan di sekolah. Berkenaan tentang pentingnya pertimbangan tingkat efektif dan efisien dalam pembiayaan pendidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Program penggunaan dana BOS pada MIS di Kabupaten Pidie disusun dan dilaksanakan oleh kepala sekolah, dengan melibatkan bendaharawan, guru senior, dan komite sekolah. Adanya pelibatan guru senior dan komite sekolah, memberi dampak positif terhadap keefektifan perencanaan dan penggunaan dana BOS.

Strategi penggunaan dana BOS pada MIS di Kabupaten Pidie ditinjau dari sisi keuangan, bahwa semua jenis pengeluaran untuk kegiatan pendidikan pada sekolah harus diketahui bersama, baik kepala sekolah maupun pihak-pihak internal sekolah yang terlibat dalam proses penyusunan RAPBS. Dengan tepatnya strategi penggunaan, maka berdampak positif terhadap terciptanya transparansi dalam penggunaan dana BOS.

Pengawasan penggunaan dana BOS pada MIS di Kabupaten Pidie dilakukan oleh kepala sekolah dan pejabat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie sebagai pengawas

internal. Pengawasan eksternal terdiri dari tim inspektorat dan BPKP. Sistem pengawasan yang dilakukan adalah dengan cara mengamati setiap pemasukan dan pengeluaran dana BOS. Pemantauan atau pemeriksaan dengan melakukan pengamatan secara tidak langsung misalnya setiap pengeluaran dana harus atas persetujuan kepala sekolah atau bendaharawan. Pemeriksaan keuangan juga dilakukan dengan cara memeriksa laporan keuangan pada setiap kegiatan yang dilakukan, yang diserahkan oleh guru atau bendaharawan.

Saran

Disarankan kepada kepala MIS terus berupaya mengotimalkan manajemen pembiayaan pendidikan khususnya dalam penggunaan dana BOS agar meningkatkan mutu madrasah ibtidaiyah. Upaya ini dapat ditempuh dengan penyusunan program pembiayaan tetap menganut azas efektivitas dan efisiensi, guna tercapainya program-program yang telah ditetapkan dan hendaknya melibatkan pihak yang memiliki kemampuan dalam bidang pembiayaan pendidikan.

Diharapkan kepada Kepala Sekolah sebagai kuasa pengguna anggaran dapat lebih meningkatkan kerjasama lebih intensif dan harmonis dengan bendaharawan, dan kepala tata usaha MIS Kabupaten Pidie, dalam proses pengeluaran biaya akan memperoleh persepsi dan memiliki komitmen yang sama untuk peningkatan kualitas dalam pelaksanaan

manajemen pembiayaan dengan lebih baik lagi, sehingga pada akhirnya dapat memajukan madrasah ibtidaiyah swasta di masa akan datang.

Diharapkan kepada pihak terkait lebih meningkatkan upaya pembinaan pengawasan dalam pengelolaan biaya pendidikan khususnya dalam pengawasan dana BOS pada MIS guna tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam sistem manajemen pembiayaan pendidikan. Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perlu adanya instrumen yang dijadikan tolok ukur untuk melihat kesesuaian program pembiayaan dan proses penggunaan anggaran pada masing-masing sekolah.

Supriadi, D., 2006. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Tilaar, H.A.R., 2007. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abubakar dan Kurniatun, T.C., 2012. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Depdiknas, 2010. *Renstra Kemendiknas 2010*. Jakarta: Depdiknas.
- Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2012. *Peraturan Mendikbud Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud.
- Fattah, N., 2008. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Banyu Quraisy.
- Gojali, I., dan Umiarso, 2010. *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Mulyono, 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sagala, S., 2010. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Soewartoyo, 2007. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suharsaputra, U., 2010. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama.